



UNIVERSITAS TERBUKA

Penguatan Profesionalitas Guru dalam Menjawab Tantangan Abad-21

Editor:

Udin S. Winataputra
Udan Kusmawan
Dodi Sukmayadi



PENERBIT UNIVERSITAS TERBUKA



UNIVERSITAS TERBUKA

Penguatan Profesionalitas Guru dalam Menjawab Tantangan Abad-21

Editor:

Udin S. Winataputra
Udan Kusmawan
Dodi Sukmayadi

Sekapur Sirih Oleh Sumarna Surapranata, Ph.D
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

	Halaman
SEKAPUR SIRIH	iii
SAMBUTAN REKTOR	v
DAFTAR ISI	vii
KATA PENGANTAR	ix
SELYANG PANDANG	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xix
Landasan Filosofis dan Yuridis Pendidikan Guru dan Penerapannya dalam Program Pendidikan Guru Jarak Jauh di Universitas Terbuka	1
▪ <i>Prof. Dr. H. Udin Saripudin Winataputra</i>	19
Program dan Kebijakan Guru Profesional	19
▪ <i>Udan Kusmawan, Ph.D</i>	33
Guru, Kurikulum, dan Inspiratif Pedagogi	33
▪ <i>Prof. Ojat Darajat, Ph.D</i>	46
Sekolah Sebagai Pembentuk Budaya Bangsa ditengah Isu Multikultur	46
▪ <i>Dr. Rhini Fatmasari</i>	61
Landasan Etno Pedagogi Pendidikan Guru	61
▪ <i>Dr. Dodi Sukmayadi</i>	75
Teori Belajar Konstruktivistik dalam Aktivitas dan Pembelajaran	75
▪ <i>Dr. Benny A. Pribadi</i>	87
Pembelajaran Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi untuk Anak Usia Dini	87
▪ <i>Dr. Siti Aisyah</i>	102
Model Pembelajaran Berbasis Permainan Komprehensif untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif dan Sosial Emosional Anak Taman Kanak-Kanak	102
▪ <i>Dr. Sri Tatminingsih</i>	120
Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar	120
▪ <i>Dr. A.A. Ketut Budiastra</i>	120

Penerapan Model Pembelajaran CORE dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Aljabar	
▪ <i>Dr. Yumiati</i>	135
Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad vs Ekspositori Terhadap Hasil Belajar Konsep Fisika Siswa Sekolah Menengah	
▪ <i>Dr. Proyekti</i>	157
OER dalam Pendidikan Guru Pada Sistem Pendidikan Jarak Jauh *	
▪ <i>Dr. Durri Andriani</i>	170
Penilaian Kinerja dan Otentik dalam Pembelajaran	
▪ <i>Dr. Amdia Sapriati</i>	187
Pemanfaatan Learning Analytics pada Pembelajaran Online	
▪ <i>Kristanti Ambar Puspitasari, Ph.D.</i>	205

KATA PENGANTAR

Profesionalitas guru di Abad-21 merupakan tuntutan sekaligus tantangan yang tidak terelakan baik bagi guru itu sendiri maupun bagi lembaga pendidikan keguruan, termasuk bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT). Sebagai wujud kontribusi dan akuntabilitas kami dalam memberi arah penguatan profesionalitas guru, tahun ini, FKIP-UT menerbitkan buku dengan judul **Penguatan Profesionalitas Guru dalam Menjawab Tantangan Abad-21 (Enhancing teacher professionalism for quality education)**. Buku ini tentu merupakan hasil karya dan persembahan terbaik dari para dosen FKIP-UT.

Dengan rasa bangga dan penuh harapan, kami persembahkan buku ini kepada guru dan praktisi dibidang pendidikan. Saya yakin para guru, para praktisi pendidikan, dan berbagai pihak terkait lainnya dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu sumber terpercaya dalam upaya pengembangan dan inovasi pendidikan. Kami yakin bahwa ke depan FKIP-UT akan selalu menyampaikan beragam hasil kajian dan pemikirannya melalui penerbitan buku-buku selanjutnya.

Kepada para para penulis dan pihak lainnya yang terlibat dalam penyusunan dan pengemasan buku ini, atas nama seluruh staf dan pimpinan FKIP-UT, dengan segenap kebanggaan kami, saya menyampaikan terima kasih dan selamat atas diterbitkannya buku ini.

Tangerang Selatan, 26 November 2016
 Dekan FKIP Universitas Terbuka,


 Udan Kusmawan, Ph.D.

SEKOLAH SEBAGAI PEMBENTUK BUDAYA BANGSA DI TENGAH ISU MULTIKULTUR

Dr. Rhimi Fatmasari, riens@ecampus.ut.ac.id
Dosen Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Terbuka

Abstrak

Pembentukan budaya bangsa merupakan salah satu tugas yang diemban sekolah. Hal ini disebabkan karena karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural. Sekolah diharapkan mampu melahirkan cikal masyarakat yang mampu menegakkan suatu kehidupan bersama yang demokratis, human dignity, menghormati akan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, dan bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan multikultur melalui pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada dimensi personal, sosial, spatial dan temporal. Upaya pembentukan nilai-nilai bangsa dilakukan dalam praktik "sekolah sebagai pusat kebudayaan" sebagai wahana transformasi budaya. Pencapaian pendidikan sesuai visi bangsa akan terlaksana dengan baik, jika ditunjang dengan kecukupan anggaran pendidikan yang memadai. Anggaran pendidikan yang memadai akan menciptakan model pendidikan dan sekolah yang bermutu, dalam arti memiliki fasilitas yang memadai, kurikulum dan kelengkapannya, tenaga guru yang kompeten, waktu belajar, sistem evaluasi yang baik serta lingkungan sekolah yang kondusif.

Kata Kunci: pembentukan budaya bangsa, sekolah, pembudayaan anggaran pendidikan

LATAR BELAKANG

Krisis multidimensi saat ini masih menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selain krisis ekonomi, krisis moral dan spiritual serta disorientasi nilai dan visi kebangsaan masih menjadi masalah yang krusial yang dihadapi bangsa ini. Permasalahan ini menjadi pelik karena telah menyerang bangsa Indonesia dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan. Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis visi dan karakter kebangsaan, kehilangan pijakan dan orientasi nilai dalam sikap dan

tindakannya. Tindakan-tindakan yang seharusnya berpijak pada nilai etika dan moralitas, sering dikalahkan pada orientasi pragmatisme dan kepentingan sesaat. Sehingga akhirnya terlihat bahwa seluruh komponen bangsa telah kehilangan jati diri dan arah dalam mencapai cita-cita luhur para *founding fathers*.

Hal yang paling menyedihkan sebenarnya justru terlihat pada kondisi pendidikan. Merosotnya nilai-nilai moral dan etika terlihat mewarnai para pelajar dan mahasiswa. Meskipun masih ada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi dan membawa nama harus bangsa Indonesia. Pertanyaan mendasar yang seharusnya kita ajukan adalah "apakah pendidikan kebangsaan kepada anak - anak didik masih secara konsisten kita lakukan ? Kenyataan di masyarakat mencerminkan bahwa pemahaman tentang arti negara dan bangsa di kalangan anak didik sangat minim dan bahkan sangat memprihatinkan.

Saat ini banyak kita jumpai pelajar yang tidak mengenal para pejuang bangsa, bahkan tidak mengerti sejarah perjuangan bangsanya. Ironisnya lagi banyak yang tidak mengenal lagu Indonesia Raya. Bahkan ada di antara anak didik yang tidak hafal bunyi sila-sila Pancasila. Di beberapa sekolah, terutama di kota besar, sudah tidak dijumpai lagi upacara bendera hari Senin pagi, juga tak ada upacara bendera hari besar Nasional. Praktis anak-anak didik sedikit sekali mendapat kesempatan untuk mengenal nilai kebangsaan Indonesia sebagai nilai untuk merekatkan persatuan bangsa Indonesia. Anak-anak didik justru lebih banyak dicekoki dengan informasi dan daya hidup yang kebarat-baratan dan jauh dari nilai-nilai ke-Indonesiaan. Menyikapi fenomena tersebut, sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan lahirnya pengembangan dan perubahan di sektor pendidikan. John Dewey (1964) menyatakan bahwa "the educational process has no end beyond itself; it is its own end; and that the education process is one of continual reorganizing, reconstructing, transforming".¹

Kenyataan di lapangan menunjukkan sekolah-sekolah di Indonesia belum menjadi pusat kebudayaan. Dalam arti sekolah yang mampu mengembangkan karakter, kemampuan, perilaku dan pembiasaan.² Jika terus memperhatikan persoalan pendidikan ini, sudah saatnya pemerintah

¹ John Dewey, *Democracy and Education*, New York: The Macmillan Company, 1916.
² Soedjarto, 2008, *Landasan dan Arah Pendidikan Kita, Jakarta* PT Kompas Media Nusantara

menekankan pada pencapaian nilai-nilai dan sikap, perilaku anak didik daripada hanya terpaku pada pencapaian aspek kognitif semata. Karena Negara kebangsaan yang demokratis dalam sistem pendidikannya selalu dikenal adanya program pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Tujuan dari program ini adalah agar setiap warga Negara memahami sistem sosiopolitik Negara, termasuk latar belakang sejarahnya. Materi pelajaran ini disajikan untuk meningkatkan "sense of nationality" dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga dari negaranya.³

Mengagendakan pendidikan kebangsaan pada level pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar (sekolah dasar) merupakan sebuah keniscayaan. Artinya, "nasionalisme" kurikulum, buku pelajaran, dan cara mengajar guru menjadi agenda mendasar. Ketika mengajarkan "kebudayaan" guru tidak hanya mengajarkan nama-nama suku bangsa atau pakatan adat Indonesia. Lebih dari itu guru harus menanamkan budaya dalam arti yang sebenarnya, dalam arti keseluruhan cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Menyadarkan bahwa budaya Indonesia lebih memiliki nilai (luhur) daripada kebudayaan asing. Hal ini tentu dengan tetap mengontrol kesesuaiannya dengan nilai akhlakul karimah, yang secara langsung akan mengokohkan jati diri dan karakter bangsa. Peran sekolah sebagai pusat kebudayaan tentu saja tidak dapat berdiri sendiri. Karena sangat membutuhkan dukungan Demikian pula buku pelajaran yang diadopsi dari kurikulum. Contoh-contoh dalam buku pelajaran yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia sudah sahnya diganti. Mengagendakan pendidikan kebangsaan yang dimulai dari tingkat pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar

Membangun karakter bangsa adalah satu-satunya solusi yang tepat dalam menghadapi krisis ini. Hal yang menakutkan ini hanya pernah di terapkan oleh presiden pertama kita yaitu Bung Karno pada saat itu bangsa Indonesia masih memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dengan karakternya sendiri, yaitu kesatuan seluruh wilayah dan hati bangsa Indonesia serta kepercayaan diri bangsa Indonesia yang tinggi sehingga mampu menjadi bangsa yang patut dibanggakan. Satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah dukungan penyelenggaraan pendidikan secara materi. Karena pendidikan yang berkualitas tidak berbiaya murah. Kenyataannya struktur pembiayaan pendidikan di Indonesia hanya 1,4 persen dari PDB

³ Ibid

pendidikan dinyatakan hampir 20% dari APBN. Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu menata ulang kembali strategi pendidikan Indonesia untuk menghadapi era globalisasi yang mengancam nilai-nilai kebangsaan dan budaya saat ini.

PENDIDIKAN MULTIKULTUR DI ERA GLOBALISASI

Kondisi Indonesia sebagai negara besar yang pluralis dan multi-kultural merupakan sebuah realitas obyektif. Besar karena wilayahnya amat luas dan jumlah penduduknya yang demikian banyak dan plural, karena keberagaman budaya, yang secara filosofis terungkap dalam semboyan bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Indonesia hadir tidak lepas dari konsep kehadiran sebuah negara bangsa (*nation-state*) yang tumbuh dari kesadaran nasionalisme para pejuang dan pendiri bangsa. Munculnya kesadaran berbangsa, merupakan satu modal mendasar yang amat penting artinya bagi kehadiran bangsa Indonesia.

Apakah bangsa itu? (*Qu'est ce qu'une nation?*). Menurut Ernest Renan (1823-1892)⁴, yang pendapatnya sering dikutip Bung Karno, "Bangsa.... hadir karena ada kesamaan nasib dan penderitaan, serta adanya semangat dan tekad untuk berhimpun dalam sebuah "nation". Lebih lanjut Renan berpendapat, "...bangsa itu ialah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena adanya kesadaran, bahwa orang telah berkorban banyak, dan bersedia untuk memberi korban itu lagi.... manusia itu bukanlah budak dari keturunannya (ras) atau dari bahasanya, atau dari agamanya, Suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan bangsa". Dengan demikian, bangsa hadir bukan dikarenakan adanya kesamaan budaya, suku, ras, etnisitas, agama dan pertimbangan-pertimbangan ikatan primordialisme yang lain, tetapi lebih menekankan pada adanya kesamaan nasib dan keinginan untuk hidup bersama dalam sebuah komunitas bangsa.

Ada satu hal menarik tentang paham kebangsaan yang dilontarkan oleh Mohammad Hatta⁵ "bangsa ditentukan oleh sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang

⁴ Renan, Ernest. (1990). "What Is A Nation ?" dalam *Nation and Narration*.
 Diedit oleh Homi Bhabha, London: Routledge.

⁵ Mohammad Hatta: beberapa pokok pikiran : Jakarta U-I-Press, 1992

bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak". Dalam konteks ini, maka bangsa Indonesia adalah sebuah komunitas pasca primordial – di mana realitas pluralisme dan multikulturalisme bukan lagi dipandang sebagai masalah, tetapi sebuah realitas objektif pembentuk bangsa dan merupakan modal utama bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika ini. Kemajemukan yang tergambar dalam falsafah "Bhinneka Tunggal Ika" bertujuan membangun solidaritas yang positif, baik pada level nasional atau level yang lebih kecil.

Karakteristik masyarakat multikultural yang diharapkan ialah masyarakat yang mampu mengakkan suatu kehidupan bersama yang demokratis, *human dignity*, menghormati akan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, dan bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan berwawasan multikultural dalam rumusan James A. Banks adalah: "*Multicultural education is a field of study and an emerging discipline whose major aim is to create equal educational opportunities for students from diverse racial, ethnic, social-class, and cultural groups. One of its important goals is to help all students acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to function effectively in a pluralistic democratic society and to interact, negotiate, and communicate with people from diverse groups to create a civic and moral community that works for the common good.*"⁶

Pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang bercirikan multikultural diarahkan sebagai upaya pengembangan warganegara melalui pendidikan kewarganegaraan. Pada konteks ini, kompetensi kewarganegaraan multikultural yang dimaksud dapat didasarkan pada empat dimensi kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Cogan⁷ yaitu *the personal, social, spatial*, dan *temporal dimension* untuk selanjutnya dirumuskan dalam tiga komponen kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Branson⁸ yaitu *civic knowledge, civic skill, and civic disposition*. Pengembangan warganegara multikultural mensyaratkan dimiliki-nya sikap

⁶ Renan, Ernest. (1990). "*What Is A Nation ?*" dalam *Nation and Narration*.
Diedit oleh Homi Bhabha, London: Routledge.

⁷ Cogan, J.J. and Ray Derricott (eds). (1998). *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.

⁸ Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.

nasionalisme sebagai kemampuan-kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh setiap warganegara, yang menuntut komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Berhadapan dengan perubahan masyarakat dan perubahan sosial seperti yang dijelaskan oleh Philip H Phenix "social change can be analyzed in term of the concepts of structure, function and social need. While no exact laws of social behavior have yet been formulated, some insight may be gained into the basis for individual conformity and deviation and for the transformation that take place in culture, institution, norm, roles and ranking as a result of internal stresses, environmental factors, or external pressure". Tilaar menyatakan bahwa perubahan aynng terjadi di masyarakat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu kebutuhan akan demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.¹⁰

Era globalisasi yang bertumpu pada kekuatan negara hegemonik, akan menggoyang nasionalisme suatu bangsa yang membawa dampak negatif terhadap nasionalisme. Namun demikian, era globalisasi juga memberikan tantangan baru sehingga dapat memacu semangat nasionalisme bangsa Indonesia agar mampu berkompetisi dalam persaingan global, dan menciptakan *bargaining position* dengan sentra kekuatan negara hegemonik, pada kesetaraan dan keseimbangan. Sehingga Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan negara-negara maju untuk memainkan peran baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini.

Kunci utama dalam menghadapi arus globalisasi adalah kebersamaan yang dilkat oleh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berpegang teguh pada komitmen tersebut, diharapkan bangsa Indonesia tetap memiliki sikap dan semangat nasionalisme yang tinggi. Bangsa Indonesia dituntut untuk harus mulai membangun sebuah kesadaran bahwa kita adalah sebuah bangsa yang majemuk, beda suku, agama, golongan politik, maupun kepentingan. Namun demikian, kemajemukan itu jangan lantas ditempatkan sebagai sebuah *handycap*, tapi sebagai modal dasar bahwa untuk bisa

⁹ Philip H. Phenix, *Realms of Meaning: A Philosophy of the Curriculum for General education*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1964, h. 132

¹⁰ Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Penganta Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2002, h.22

berjalan bersama kesatu tujuan dibutuhkan sikap saling percaya, saling bantu dan saling menghargai. Kebangsaan Indonesia di masa depan lebih dimaknai sebagai nasionalisme kultural yang menghargai kemanusiaan dan kebudayaan bangsa. Paham nasionalisme tumbuh menjadi sebuah ideologi yang bersifat kultural. Pluralitas dan multikultural bangsa Indonesia merupakan kekuatan bangsa yang dapat diarahkan agar saling menghargai antar kelompok, antar penganut agama, adat dan ras dengan tujuan akhir adalah semakin menguatnya kebangsaan Indonesia secara kultural.

PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBENTUK BUDAYA BANGSA

Pembahasan selanjutnya adalah perlunya membangkitkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa tanggungjawab kebangsaan. Esensi dari pendidikan kebangsaan yang terpenting adalah proses “*character and national building*”. Bagi Bangsa Indonesia, persoalan pembangunan karakter dan pembangunan Bangsa bukan barang baru. Presiden Soekarno melontarkan permasalahan nationbuilding ini dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1957. Presiden Soekarno melihat *nation building* sebagai fase kedua dalam revolusi Indonesia sesudah fase *liberation*, yaitu pembebasan dari penjajahan.¹¹ Tidak ada bangsa yang hadir tanpa nasionalisme. Karena kita tidak akan dapat membangun Bangsa tanpa membangun pendidikan. Namun setelah puluhan sampai saat ini pembangunan karakter dan pembangunan bangsa tidak banyak mendapat perhatian, khususnya dalam kaitannya dengan dunia pendidikan.

Sejatinya Pendidikan Nasional kita pada adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga Negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin, baik disiplin sosial maupun disiplin nasional, dalam etos kerja, dalam produktifitas kerja, dalam kemampuan intelektual, kemampuan profesional/ vokasional, dalam tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan dan kemanusiaan.¹² SekoPadahal “pemahaman mencerdaskan kehidupan bangsa” pada hakekatnya adalah “melakukan transformasi

berbaya dari budaya tradisional ke modern dan dari feodal ke demokratis”, suatu kondisi masyarakat Negara bangsa yang maju.¹³

Pada prakteknya upaya pembentukan nilai-nilai di sekolah yang dalam istilah Soedjarto “*sekolah sebagai pusat kebudayaan*” belum terlaksana. Peranan secara formal telah dilakukan, namun pendidikan yang dilaksanakan sampai sekarang belum dapat berfungsi sebagai wahana transformasi budaya, karena proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan sekolah dari SD sampai perguruan tinggi belum merupakan proses kebudayaan berbagai kemampuan, nilai dan sikap warga masyarakat Negara kebangsaan yang merdeka, demokratis dan berkeadilan sosial. Yang terjadi barulah proses pemberian pelajaran untuk hafalan dan prasarana pendidikan yang tidak memungkinkan terjadinya fasilitas dan prasarana pendidikan yang tidak memungkinkan sebagai proses kebudayaan sebagaimana seharusnya. Pendidikan sebagai karakter kebudayaan inilah yang hakikatnya merupakan pembangunan karakter manusia Indonesia sebagai bagian dari pembangunan radikal (revolusioner)¹⁴

Untuk itu perlu ditempuh suatu perubahan radikal (revolusioner) dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia, dari masyarakat yang ber-bhinneka Ketunggal Ika-an, dan masyarakat tradisional dan feodal menuju masyarakat yang modern dan demokratis.¹⁵ Tujuan ini hanya akan dapat tercapai melalui pendidikan yang diselenggarakan dengan baik dan terencana secara Nasional.

ASPEK EKONOMI SEBAGAI PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Aspek ekonomi memandang pendidikan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Dellores menyatakan bahwa this progress is due above all to the capacity of humanity to control and organize its environment in accordance with its need, in other word, to science and

¹³ Soedjarto, 2012, *Pancasila sebagai Falsafah Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan Maknanya bagi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional*, disajikan dalam Hari Studi Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia.

¹⁴ Soedjarto op.cit., h.15

¹⁵ Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia

¹¹ Ir Soekarno, 1965, Satu Tahun Ketentuan. Dibawah Bendera Revolusi, jilid kedua, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, h.498.
¹² Soedjarto, 2008, Landasan dan Arah Pendidikan Kita, Jakarta “PT Kompas Media Nusantara”,h.319

education, the main driving forces of economic progress.¹⁶ Agar terselenggara pendidikan yang bermutu dan bertindak sebagai "Pusat Kebudayaan" diperlukan dukungan ekonomi dari sisi pendanaan yang memadai. Philip Kotler menyatakan bahwa "without sustained and continues economic progress at the individual and societal level, human potential will not be realized. One clearly has to "have enough in order to be more". Rising per capita incomes, the elimination of absolute poverty, greater education and employment opportunities, and lessening income inequalities therefore constitute the "necessary", albeit not sufficient, goals for development.¹⁷ Karena dukungan sisi ekonomi terhadap pendidikan secara tidak langsung juga memberikan dukungan terhadap perkembangan ekonomi. Confucian society encouraged economic growth through its support of education and achievement.¹⁸ Menurut Soedjiarto anggaran Bermutu berarti memiliki fasilitas yang memadai, kurikulum dan kelengkapannya, tenaga guru yang kompeten, waktu belajar, sistem evaluasi yang baik serta lingkungan sekolah yang kondusif.¹⁹

Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan *human capital*, aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Pada gilirannya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan (earning) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemikiran ini dikonseptualisasikan oleh Elchanan Cohn (1979)²⁰ dalam suatu model sebagai berikut :

¹⁶ Jacques Delors et.al, Learning: The Treasure Within, The Report to UNESCO of International Commission for The Twenty-First Century, Paris: UNESCO, 1996, h.71

¹⁷ Philip Kotler et.al, 1997, *The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth*, New York: The Free Press, h. 23.

¹⁸ Ronald Inglehart, 1997, *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change In 43 Societies*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, h. 3.

¹⁹ Soedjiarto op.cit, h.315

²⁰ Elchanan Cohn, Sherrie L. W. Rhine and Maria C. Santos, (1989) *Institutions of Higher Education as Multi-Product Firms: Economies of Scale and Scope, The Review of Economics and Statistics* Vol. 71, No. 2 (May, 1989), pp. 284-290



Pendekatan Human Capital dalam Pendidikan (Cohn, 1970: 29)

Gambar A.4.1

Jika dicermati, bahwa pendidikan berfungsi untuk memberikan kemampuan pada seseorang agar mampu berperan dalam kehidupannya kelak, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Bila berbicara mengenai investasi manusia, jelas tidak boleh lepas dari fungsi pendidikan. Adam Smith dan Alfred Marshall (dalam T.K Meti)²¹ mengemukakan keyakinannya bahwa "the most valuable of all capital is that invested in human beings". Jika kita telaah APBN tahun 2013, pemerintah telah mengalokasikan Rp 331,8 triliun untuk anggaran sektor pendidikan²². Dinyatakan pula bahwa jumlah tersebut selain telah memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, merupakan peningkatan 6,7 persen dibanding anggaran yang dilokasikan tahun 2008 lalu sebesar Rp 310,8 triliun.

Akan tetapi anggaran sebesar itu lebih banyak diperuntukkan pada pembiayaan konsumtif daripada peningkatan pelayanan pendidikan. Anggaran tersebut digunakan oleh pemerintah dengan rincian:

- Penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA;
- pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB) dan 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB; dan rehabilitasi ruang kelas rusak SMA/SMK/MA;
- Menyediakan bantuan bagi sekitar 14,2 juta siswa dan mahasiswa kurang mampu, dan memberikan beasiswa prestasi bagi 220.000 siswa dan mahasiswa;

²¹ T.K Meti, 1989, *Agricultural Growth and Non Agricultural Growth Dynamic of National Development*, Gian Publishing House, h.50

²² Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013

- Memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas rusak berat SMA/SMK/MA dan sekitar 30.350 ruang kelas rusak sedang SD/MI/SMP/MTs.
- Penyediaan dana tunjangan profesi guru: Rp43,1 T, naik Rp12,5 T atau lebih dari 40% dibanding pagu APBNP Tahun 2012;
- Pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di sekolah/madrasah.
- Pembentukan endowment fund berupa "Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)", sejak tahun 2010; dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya juga ditujukan untuk pembentukan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam
- Secara akumulatif, jumlah DPPN sejak tahun 2010 hingga 2012 (APBNP) mencapai Rp10,6 T, sedangkan dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp5 T;

Jika kita amati angka-angka dia atas terlihat cukup besar, namun sebenarnya hanya sedikit dana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU), mayoritas dimanfaatkan untuk gaji guru, Dana Alokasi Khusus (DAK), tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lainnya. Soedijarto menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Indonesia hanya 1,4 persen dari PDB.²³ merupakan anggaran terendah di Asia. Sedangkan Negara-negara Uni Eropa rata-rata mengalokasikan anggaran 5 persen dari PDB dan Belanda serta Jepang 7 persen dari PDB. Hal ini disebabkan di Negara yang sudah maju Pendidikan dipandang sebagai aspek konsumtif dan investatif (Human Investment) dan menjadi *leading sector*.

Kebijakan pemerintah ini bukannya dibiarkan oleh para pemerhati pendidikan di Indonesia. Tidak dibayainya pendidikan secara memadai sesuai dengan ketentuan yang tersirat dan tersurat, baik dalam UUD 1945, maupun UU No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 49 ayat (1) menetapkan minimal 20 % APBN tidak termasuk gaji guru pada hakekatnya menyimpang

²³ Soedijarto op.cit., h.355

dari hakekat Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan. Karena tanpa pendidikan yang bermutu yang dapat menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual, berwatak, beretos kerja tinggi, berdisiplin, dan bermoral, kesejahteraan tidak akan meningkat. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukan gaji guru dalam anggaran pendidikan 20 persen dinilai sangat aneh dan mengabaikan kondisi objektif masyarakat. Putusan tersebut akan merugikan guru dan secara langsung menghambat pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusi, menyediakan pelayanan pendidikan bermutu dan gratis bagi masyarakat terutama pada tingkat dasar. Hal tersebut mengemuka dalam sidang pertama eksaminasi atas putusan MK no.24/PUU-V/2007 di Wisma PGI (12/3/03). Hadir dalam sidang, tim perumus yang berasal dari Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan serta lima orang anggota majelis eksaminasi, yaitu Prof. Dr. Winarno Surachmad, Prof. Sudijarto, Zainal Arifin M.Husein, S.H.,L.L.M, Supriyadi Widodo, dan Yuna Farhan.

Menurut pakar pendidikan Prof. Sudijarto, latar belakang ditetapkannya ayat (4) pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, bukan asal comot. Tapi merupakan upaya agar pemerintah dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya, seperti membiayai sepenuhnya penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan tidak dimasukkannya gaji guru dalam anggaran pendidikan, bukan berarti kesejahteraan guru diabaikan. Sebab, dalam UU Sisdiknas 20/2003 maupun UU 14/2005 mengenai guru dan dosen, hal tersebut telah dijamin. Bahkan guru berhak mendapat berbagai penghasilan dan tunjangan, misalnya tunjangan profesi atau masalah tambahan.²⁴

Melihat kenyataan seperti itu bagaimana mungkin Indonesia mencapai satu kondisi pembangunan ekonomi yang tinggi dengan ditunjang oleh pembentukan tenaga kerja yangampil mengelola sumber daya alam. Karena Deloors²⁵ menyatakan bahwa "*Education system can therefore no longer be expected to train labor force for stable industrial jobs; they must*

²⁴ [http://www.antikorupsi.org/id/content/putusan-mk-hambat-pencerdasan-](http://www.antikorupsi.org/id/content/putusan-mk-hambat-pencerdasan-bangsa)

²⁵ Delors, op.cit, h.71

instead train individuals to be innovative, capable of evolving, adapting to a rapidly changing world and assimilating change. "

Dengan hasil pendidikan yang demikian akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi negara. Negara akan mengalami kemajuan pada ketersediaan sumber daya manusia yang dapat menambah nilai modal dalam pembangunan adalah manusia yang dipandang sebagai profesionalitas (*skill*) dalam kehidupannya, karena manusia mempunyai harga yang dapat diketahui dari ide-ide (pemikiran) sehingga akan melahirkan kreativitas yang diciptakannya, akibat dari hasil pendidikan yang diperolehnya.

PENUTUP

Pendidikan dipandang sebagai pusat kebudayaan bagi bangsa Indonesia, di tengah-tengah kondisi bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Pendidikan juga harus mampu berkembang dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang multikultur. Bangsa Indonesia harus mengakui, menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan mendasar dengan orang-orang yang berbeda budaya dengannya. Menjadikan pendidikan yang bersifat multikultural berarti memposisikannya sebagai gerakan sosial budaya yang terkait pada suatu kesatuan komunitas budaya global. Dengan menjadi bangsa yang multikultural, sejatinya bangsa Indonesia telah berupaya mengurangi konflik antar budaya, antar etnis, antar kelompok yang menjadi intisari dari pendidikan kebangsaan.

Disamping itu agar dapat menyelenggarakan pendidikan yang baik dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan *founding father*, maka alokasi anggaran pendidikan harus cukup besar dan didukung oleh segenap elemen bangsa.

PUSTAKA

Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.

Cogan, J.J. and Ray Derricott (eds). (1998). *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page

Hilman Cohn, Sherrie L. W. Rhine and Maria C. Santos, (1989) *Institutions of Higher Education as Multi-Product Firms: Economics of Scale and Scope, The Review of Economics and Statistics* Vol. 71, No. 2 (May, 1989), pp. 284-290

Hoekarno, 1965, Satu Tahun Ketentuan. Dibawah Bendera Revolusi, jilid kedua, Panidya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi

Inquest Delors et.al, Learning: The Treasure Within, The Report to UNESCO of International Commission for The Twenty-First Century, Paris: UNESCO, 1996

John Dewey, (1964), *Democracy and Education*, New York: The Macmillan Company

Mohammad Hatta, (1992), Beberapa pokok pikiran : Jakarta UI-Press.

Philip H. Phenix, Realms of Meaning, (1964), *A Philosophy of the Curriculum for General education*, New York: McGraw-Hill Book Company

Philip Kotler et.al., 1997, *The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth*, New York: The Free Press.

Renan, Ernest. (1990). "What Is A Nation ?" dalam *Nation and Narration*. Diedit oleh Homi Bhabha, London: Routledge.

Ronald Inglehart, 1997, *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Soedjiarto, (2008), Landasan dan Arah Pendidikan Kita, Jakarta"PT Kompas Media Nusantara

Soedjiarto, 2008, Landasan dan Arah Pendidikan Kita, Jakarta"PT Kompas Media Nusantara.

Soedjiarto, 2012, Pancasila sebagai Falsafah Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan Maknanya bagi Penyelenggaraan Sistem